

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL PENELITIAN

Pada bab terakhir ini akan dipaparkan rangkuman isi bab yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut kesimpulan dan rekomendasi berkenaan dengan masalah yang diketengahkan berdasarkan hasil penelitian ini. Termasuk diantaranya pemaparan mengenai ganjalan pelaksanaan studi ini secara keseluruhan.

#### A. Kesimpulan

1. Pemukiman Sukapakir adalah salah satu dari sejumlah pemukiman kumuh di Kotamadya Bandung. Dikatakan demikian karena didaerah ini ditemukan ciri-ciri menonjol akan predikat tersebut, terutama jika dibandingkan dengan jenis pemukiman lain yang dihuni oleh kalangan masyarakat di atasnya. Adapun ciri-ciri yang menonjol tersebut, adalah: secara demografis pemukiman ini dihuni oleh penduduk yang padat, baik karena pertumbuhan alamiah maupun migrasi dari pedesaan. Secara ekonomi rata-rata berpenghasilan rendah karena bekerja disektor-sektor informal. Sebagian besar kondisi perumahannya berkualitas rendah atau darurat. Kondisi kesehatan dan sanitasi lingkungan di daerah ini rendah, sehingga dari waktu ke waktu sering dijangkiti penyakit menular. Langka terdapat sarana dan prasarana pelayanan kota, apabila adapun keberadaannya tidak berlangsung lama. Pertumbuhannya terutama dari

segi fisik tidak terencana, pembangunan fisik rata-rata bersifat tambal sulam dan berjangka pendek. Gaya hidup pedesaan maupun kemiskinan masih dominan di daerah ini, salah satu indikatornya ditemukan banyak renternir serta banyak pula terjerat olehnya. Secara sosial terisolasi dari kalangan masyarakat di atasnya, dan secara politik keberadaan penduduknya sering dijadikan sebagai objek bagi kepentingan politik tertentu. Berdasarkan ciri-ciri di atas di daerah ini ditemukan pula gejala penyimpangan perilaku yang cukup tinggi baik berbentuk kenakalan remaja, kriminal, perjudian, maupun prostitusi, dua hal terakhir ini dilakukan secara terbuka maupun terselubung.

2. Berdasarkan ciri-ciri yang menonjol di atas, penduduk daerah ini menyandang status sosial ekonomi yang rendah. Perwujudannya diuraikan di bawah ini :

#### 2.1 Gaya hidup

Kemiskinan yang dialaminya telah menjadi sub budaya dengan implikasi : orientasi hidup yang berjangka pendek dan praktis, secepat mungkin mengharapkan anak-anaknya “mandiri” tanpa membekali keterampilan memadai bagi masa depannya, dan dalam hal-hal tertentu mengharapkan perubahan hidupnya melalui cara-cara tradisional (mistik dan bersipat spekulatif)

#### 2.2 Kondisi Perumahan

Kondisi perumahan yang buruk serta tingkat hunian yang melebihi kapasitasnya serta merangkap sebagai tempat produksi kegiatan

usahanya, mengakibatkan secara : psikologis, kesehatan, sanitasi perumahan, rumah tersebut tidak layak untuk dihuni.

### 2.3 Pola Konsumsi

Seluruh penghasilan pada hari itu kadang-kadang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer, terutama pangan. Oleh karena itu keadaan ini memaksa mereka memprioritaskan kebutuhan lainnya seperti sandang, kesehatan, perbaikan rumah maupun pendidikan anak-anaknya.

### 2.4 Latar Belakang Pendidikan Orang Tua

Putus sekolah pada jenjang pendidikan SD maupun SLTP adalah rata-rata latar belakang pendidikan orang tua di daerah ini. Apalagi jika di runut kebelakang satu generasi dari para orang tua (saat ini), dahulunya orang tua (kakek dan neneknya anak-anak) mayoritas sebagai buruh tani buta huruf di pedesaan. Berdasarkan kenyataan ini para orang tua (saat ini) ditambah dengan keterbatasan lainnya, merasa kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak pada jenjang pendidikan SD apalagi di atasnya. Kesulitan-kesulitan tersebut berkisar pada : bagaimana membiayainya, bagaimana memotivasi serta menghadapi kesulitan belajar anak dan bagaimana memahami apa makna (manfaat, tujuan, dan fungsi) sekolah bagi kehidupannya.

3. Berkenaan dengan keberadaan penduduk di daerah ini yang rata-rata berstatus sosial ekonomi rendah, ditemukan sejumlah kriteria utama dalam hal mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah dasar antara lain :

- 3.1 Sedapat mungkin jaraknya harus dekat dengan rumah dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki, maksudnya untuk menghilangkan biaya transportasi.
  - 3.2 Biaya (SPP – sumbangan pembiayaan pendidikan) yang dalam hal ini dikelola BP3 diusahakan serendah mungkin.
  - 3.3 Tindakan guru dan kepala sekolah dalam hal pungutan-pungutan lain di luar SPP (BP3), dalam hal ini didasarkan pada : bagaimana situasi tabungan anak-anaknya, berapa besar biaya perpisahan murid kelas VI, berapa besar biaya piknik dan pungutan (sumbangan) wajib maupun sukarela lainnya.
  - 3.4 Besarnya NEM (Nilai Evaluasi Murni), karena melalui rata-rata NEM yang baik dari sekolah ini, memungkinkan anak tersebut di terima SLTP Negeri. Hal ini dapat menghemat biaya sekolah dibandingkan jika anak tersebut melanjutkan pendidikan ke SLTP Swasta.
4. Berdasarkan butir 3 di atas, kenyataannya penduduk di daerah ini dalam kurun waktu 1993 – 1998 sangatlah sedikit di terima di SD Negeri. Hal ini terjadi karena pada saat itu kapasitas SD Negeri masih terbatas dibandingkan dengan calon murid sehingga diperlukan seleksi yang relatif ketat dalam berbagai hal akibatnya :
- 4.1 Banyak yang tidak diterima di SD Negeri sehingga dengan sangat terpaksa mereka bersekolah di SD Swasta yang biaya sekolahnya relatif lebih tinggi serta mutunya rata-rata dibawah SD Negeri. Namun anak-anak yang bersekolah di SD Swasta ini rata-rata mereka tidak berlangsung sebagaimana mestinya sehingga banyak diantaranya mengalami putus sekolah.

5. Sejak dicanangkan wajib belajar tanggal 2 Mei 1984 hingga sekarang, penyelenggaraan pendidikan dasar di daerah ini mengalami perubahan. Perubahan tersebut, diantaranya :
  - 5.1 Hampir seluruh anak usia sekolah dasar termasuk yang berusia lebih dari tujuh dan delapan tahun diterima menjadi murid SD Negeri.
  - 5.2 Kriteria pemilihan sekolah seperti dipaparkan butir 3 di atas, tidak lagi dilakukan berdasarkan antar kompleks sekolah (biasanya terdapat beberapa sekolah dasar) melainkan dilakukan antar satu sekolah dasar dari setiap kompleks sekolah.
  - 5.3 Beberapa buah SD swasta di daerah ini mengalami kekurangan murid, malahan beberapa diantaranya menutup kegiatannya. Menurut para guru dan kepala sekolah juga aparat pemerintah setempat, gejala ini timbul selain karena dibangunnya gedung-gedung SD Negeri baru juga karena keberhasilan program Keluarga Berencana.
  - 5.4 Satu hal yang menonjol dari masuknya anak-anak berusia lebih dari tujuh dan diterima menjadi murid kelas satu pada saat awal pencanangan gerakan wajib belajar, mereka ini lebih sering mengalami kegagalan baik tinggal kelas maupun putus sekolah, dibandingkan anak-anak yang pada saat kelas satu berusia enam tahun. Menurut para guru dan kepala sekolah, diduga penyebabnya mereka merasa malu karena secara fisik bisanya lebih besar dari teman-temannya, begitu juga umurnya lebih tua. Semua ini menimbulkan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di sekolah.

6. Dalam konteks mikro yaitu keluarga, penyebab kegagalan bersekolah baik berupa tinggal kelas maupun putus sekolah ditingkat sekolah dasar, berpusat disekitar :

#### 6.1 Orang Tua

Status sosial-ekonomi yang rendah yang diwujudkan dalam bentuk gaya hidup kemiskinan, kondisi perumahan yang buruk, pola konsumsi yang terbatas, serta latar belakang pendidikan yang rendah, menjadikan upaya menyekolahkan anak-anaknya sebagai sesuatu yang mahal dan berat. Mengingat rata-rata mereka ini berkeluarga besar (lebih dari dua anak) : anak yang lebih tua terutama anak sulung diharapkan secepatnya “mengundurkan diri” atau putus sekolah, agar kedudukannya dapat diganti oleh adik-adiknya, apalagi jika anak yang bersangkutan pernah mengalami tinggal kelas, cara ini mereka namakan giliran bersekolah; cara lain yaitu dengan menunda mendaftarkan anaknya bersekolah walaupun umur anak yang bersangkutan telah termasuk usia sekolah dasar; bagi sebagian keluarga yang masih memiliki sifat-sifat “nomaden” antara daerah asalnya dengan tempat tinggal sekarang, mereka sering merasa kerepotan mengurus pendidikan anak-anaknya karena sering berpindah tempat tinggal.

- 6.2 Keberadaan orang tua dengan segala keterbatasannya khususnya dalam hal status sosial ekonomi yang rendah, ditambah faktor internal dari anak itu sendiri berupa problema pribadi anak yang bermasalah

disekitar intelektual, fisik dan kesehatan, serta mental, menjadikan kegiatan bersekolah sebagai sesuatu yang tidak menggairahkannya. Beban ini oleh anak-anak diantaranya diekspresikan dalam bentuk reaksi negatif baik terhadap dirinya sendiri, orang tua, guru dan sekolah, maupun kepada lingkungannya.

7. Terdapat dua pilihan utama bagi anak-anak yang mengalami putus sekolah ditingkat sekolah dasar; pertama, menjadi penganggur usia muda; kedua, memasuki dunia kerja. Dua pilihan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu “keterpaksaan” memasuki kehidupan masyarakat secara dini, karena kesiapan mental, fisik, psikologis, dan sosial sama sekali belum memadai.
8. Gejala putus sekolah yang dialami anak-anak di daerah ini pada tahap-tahap awal mereka di sekolah dasar, mengakibatkan sebagian besar darinya menyandang buta hurup. Terlepas dari penyebab terjadinya putus sekolah, adanya gejala buta hurup itu sendiri dikalangan anak-anak di daerah ini merupakan pencerminan belum atau tidak tercapainya misi pendidikan umum dalam pengertian elementer (membaca, menulis, dan berhitung), dari penyelenggaraan pendidikan dasar di daerah ini.
9. Penduduk di pemukiman kumuh mendatang bahwa sekolah dasar berfungsi sebagai lembaga pembentukan kepribadian, hal ini diungkapkan dengan tipikal di kalangan mereka: “semakin lama seorang anak bersekolah, biasanya semakin taat dan patuh kepada orang tuanya”. Begitu

pula mereka memandang fungsi sekolah secara pragmatis dilihat dari pembinaan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Tiga kemampuan dasar ini perlu dimiliki dengan tujuan tipikal: “supaya tidak mudah ditipu orang”.

10. Kenyataannya persepsi penduduk di pemukiman kumuh seperti dedeskripsikan butir 1 di atas, upaya menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dasar dianggap sebagai sesuatu yang mahal dan berat. Mahal bukan berarti pemenuhan biaya secara perorangan bagi kepentingan anak yang bersangkutan belaka, melainkan menyangkut perimbangan keuangan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok seluruh anggota keluarga sehari-hari. Dan berat dalam arti keterbatasan kemampuan bagaimana memecahkan segala masalah yang ditimbulkannya termasuk bagaimana memotivasi belajar anak, semua ini berada di luar jangkauannya.
11. Mengingat penduduk di pemukiman kumuh ini sudah menempatkan kemiskinan yang dideritanya sebagai sub budaya, demikian pula dalam hal menghadapi kegagalan pendidikan anak-anaknya, mereka menganggap bukan suatu masalah melainkan sebagai sesuatu yang lumrah. Lumrah dalam arti kegagalan pendidikan tersebut sudah merupakan bagian dari sikap mental mereka. Oleh karena itu apabila terjadi kegagalan dalam mengupayakan pendidikan anak-anaknya, mereka telah “siap” menghadapi segala konsekuensinya.



12. Dilihat menurut proses berlangsungnya kegagalan pendidikan baik tinggal kelas maupun putus sekolah, salah satu penyebab utama selain karena problema pribadi anak dan pengaruh lingkungan, juga karena penerapan pola pengasuhan anak “statis” oleh orang tuanya. Oleh karena itu dalam kenyataannya apabila ditinjau dari segi peningkatan taraf hidup keluarga melalui upaya pendidikan, yang terjadi adalah “stagnasi” yang cenderung ke arah penurunan taraf hidup. Hal ini terjadi karena walaupun orang tuanya berlatar belakang pendidikan rendah namun tidak menyandang buta huruf, sebaliknya banyak diantara anak-anaknya saat ini yang mengalami putus sekolah namun menyandang buta huruf.
13. Bagi anak-anak yang mengalami putus sekolah di tingkat sekolah dasar, mereka dihadapkan pada situasi “keterpaksaan” untuk memasuki kehidupan masyarakat secara dini.
14. Kasus-kasus kegagalan pendidikan beserta implikasinya seperti yang diuraikan di atas, merupakan umpan balik yang berharga bagi pengembangan pendidikan umum baik sebagai suatu konseptual maupun sebagai suatu program. Dengan demikian diharapkan untuk masa-masa mendatang misi pendidikan umum seperti yang secara implisit dikandung dalam gerakan wajib belajar, dapat ditingkatkan lagi intensitas dan ekstensitas sasarannya, khususnya bagi penduduk di pemukiman kumuh.

## B. Rekomendasi Hasil Penelitian

1. Penelitian tentang upaya menyekolahkan anak di pemukiman kumuh seperti ini baru dilaksanakan pada tahap permulaan, sehingga banyak aspek yang belum dapat diungkapkan karena keterbatasan penguasaan metoda, keterbatasan waktu, tenaga, dan dukungan dana. Oleh karena itu perlu ada penelitian lebih lanjut yang lebih terarah, mendalam serta menyeluruh dalam segala seginya. Sejumlah pemahaman yang lebih utuh dan berdaya guna bagi pengembangan pendidikan pada umumnya.
2. Ditinjau dari pencanangan gerakan wajib belajar sejak tanggal 2 Mei 1984, layaknya semua anak usia sekolah dasar khususnya di perkotaan dalam hal ini di pemukiman kumuh, telah mengenyam pendidikan dasar serta mampu menamatkannya hingga sekurang-kurangnya kemampuan melek hurup fungsional. Namun dalam kenyataannya bagi penduduk di pemukiman kumuh, masih terdapat beberapa pihak yang telah mengenyam beberapa tahun pendidikan dasar, karena berbagai hal berkaitan dengan status sosial ekonomi rendah yang mereka alami, secara “terpaksa” harus mengalami putus sekolah dengan masih menyandang buta hurup.
3. Keberadaan anak-anak usia sekolah dasar yang mengalami putus sekolah khususnya yang masih menyandang buta hurup, merupakan gejala yang mengkhawatirkan terutama apabila ditinjau dari pengembangan sumber daya manusia yang saat ini sedang digalakkan. Oleh karena itu diperlukan lembaga pendidikan alternatif berupa pendidikan non-formal mulai dari paket A, paket B, dan program keterampilan lainnya. Diharapkan melalui

pendidikan alternatif tersebut dapat ditumbuh-kembangkan segi-segi kognisi, afeksi, dan psikomotor anak-anak dikalangan penduduk pemukiman kumuh yang selama ini belum digarap sebagaimana mestinya.

4. Mengingat masyarakat di pemukiman kumuh rata-rata memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan kalangan masyarakat di atasnya, oleh karena itu perlu ada pendekatan khusus demi menghilangkan sekecil faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan pendidikan diantara mereka. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan sekolah dasar di pemukiman ini selain kepala sekolah dan guru, juga aparat pemerintah setempat, dina serta instansi terkait dengan masalah ini.

